BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kesetaraan Gender dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang, dapat disimpulkan antara lain:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang diinterpretasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender. Organisasi yang menjadi *leading sector* adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Karawang, mengacu pada Surat Keputusan Bupati Karawang tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karawang Nomor 467/Kep. 542-Huk/2018 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yaitu memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kesekretariatan. Implementasi ini sudah cukup baik namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Karena apabila berbicara secara garis besar ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Karawang masih tetap ada.
2. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah mengenai Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang yaitu di bidang pendidikan perempuan masih tertinggal dibandingkan mitra laki-laki, di bidang ekonomi kemampuan perempuan untuk memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah. Dan faktor

penghambat dari segi internal yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh DPPPA Kabupaten Karawang dinilai kurang merata, kurangnya SDM, pemahaman implementor, anggaran, dan tugas focal point untuk mensosialisasikan kebijakan PUG di unit kerjanya masing-masing pun tidak dilakukan secara maksimal.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian mengenai Kesetaraan Gender dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Karawang khususnya driver/pokja terkait Pengarusutamaan Gender pada umumnya agar lebih meningkatkan perhatiannya dalam memberikan akses kepada perempuan demi kemajuan pembangunan daerah sehingga kaum perempuan di Kabupaten Karawang dapat semakin meningkatkan partisipasinya dan kontrol atau monitoring dalam pelaksanaan program PUG dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat terutama bagi perempuan di daerah Kabupaten Karawang.
2. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang mendukung pelaksanaan PUG khususnya penambahan jumlah fasilitator PUG yang memberikan pendampingan terkait pengarusutamaan gender pada masing-masing perangkat daerah di kota Karawang.